

Nomor : 57/Surat Terbuka_JSKK/X/2008

Jakarta, 23 Oktober 2008

Hal : Sumpah Pemuda Versus Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Kepada Yth,
Presiden Republik Indonesia
Bapak Susilo Bambang Yudhoyono
Di
Jakarta

Dengan Hormat,

Para *founding father* telah berfikir dan bertindak demi kepentingan jauh ke depan. Sebuah sumpah yang dikumandangkan pada 28 oktober 1928. Sumpah tersebut meliputi tiga ikrar sebagai satu bangsa, satu bahasa dan satu tanah air “INDONESIA”. Sumpah Pemuda semakin memiliki makna bagi perjalanan bangsa ketika landasan ideal berhasil dirumuskan berupa Pancasila, begitu pula dengan tersusunnya landasan struktural yakni UUD 1945. Dan kini, landasan operasional bagi kehidupan bangsa telah terjabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk perihal perlindungan hukum dan hak asasi manusia (HAM).

Makna hakiki sebuah sumpah bangsa 80 tahun lalu itu pernah dikhianati oleh sebuah pemerintahan atau rezim tangan besi. Sebuah rezim yang lebih mengejar dan mempertahankan kekuasaan daripada mengikuti aspirasi rakyat. Bagi mereka, tindakan pelanggaran HAM adalah urusan belakang yang bisa diatur atau diputihkan dengan kekuasaan pula. Karena itu, pembantaian massal ditahun 1965, pembunuhan dalam serangan 27 juli 1996 (Tragedi 27 Juli), penculikan para aktivis pro demokrasi 97/98, penembakan terhadap mahasiswa pada bulan Mei ‘98 (Tragedi Trisakti), November ‘98 (Tragedi Semanggi I), dan September ‘99 (Tragedi Semanggi II), pembunuhan massal Peristiwa Mei ‘98, Pembunuhan aktivis HAM Munir, dan peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM lainnya, oleh para pelakunya cenderung dianggap sebagai pengabdian dan bukan dosa terhadap bangsanya.

Untuk merintis kekuasaan dan keuasaan, orang-orang yang tangannya berlumuran darah pun tak segan-segan mendirikan partai dan berupaya merayu rakyat agar memilihnya menjadi Presiden RI pada Pemilu 2009 yang akan datang. Tetapi kami yakin bahwa banyak warga bangsa yang mau berfikir jernih dan mampu membaca sebuah “isyarat” yang kurang lebih dapat diterjemahkan demikian : Syukur-syukur bisa jadi Presiden, kalau tidak pun pemilu bisa menjadi sarana membangun kekuatan di parlemen (DPR RI) melalui anggota-anggota dari partainya guna membentengi dirinya terhadap setiap gugatan tidak pelanggaran HAM masa lalu.

Sebagai penutup surat singkat ini, kami mendesak Bapak Presiden Untuk :

1. Mengajak masyarakat merenungi kembali makna Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.
2. Tidak mendukung terhadap upaya pembiaran para pelaku pelanggaran HAM masa lalu bebas dari sanksi hukum.
3. Mengajak masyarakat mengawal kecusian tujuan pemilu 2009.

Demikianlah, dan atas perhatian Bapak Presiden Kami mengucapkan banyak terimakasih.

Jakarta, 23 Oktober 2008

JSKK (Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan)

Sumarsih

Suciwati

Bedjo Untung

Tembusan :

1. Kepada Yth. Bapak Menteri Sekretaris Negara RI.
2. Kepada Yth. Bapak Ketua Komnas HAM.